**PENGARUH PRILAKU MENYALAHKAN KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA KESUSILAAN DI INDONESIA**

Oleh: Muhammad Iqbal

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Ferawati, SH., MH

Alamat: Jl. Bukit Barisan, Kapau Sari IX, Perumahan Cendana, Pekanbaru

Email / Telepon : muhammadiqbalfirmansyah@yahoo.co.id / 081264242825

ABSTRACT

The culture of blaming the victim is so prevalent that many victims of sexual harassment are afraid to report their cases. Some victims may worry that they will be stigmatized. The victim is considered to have damaged the good name of the family or institution. They could even be criminalized for reporting acts of harassment or rape.

The purpose of this study is to determine the behavior of blaming victims against law enforcement in Indonesia and to determine legal protection for victims of criminal acts of decency so that they do not become victims in the Indonesian Criminal Justice System. The research method used in this research is normative legal research method. The data obtained from this research are primary data, secondary data, and tertiary data which are processed qualitatively.

Based on the results of this study, the provisions of the parties that provide protection for victim blaming victims (victims who are blamed) include, First, the state is considered as one of the important factors because the state has the authority and ability to guarantee the safety of victims. Second, community service providers, in fulfilling the victim's mental state, require community services. Third, society, in fact the community has enormous potential in providing protection and support for victims.

Keywords: *victim, blame the victim, law enforcement*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.¹ Pada akhirnya hak korban yang justru diabaikan dan justru terkadang menyalahkan korban.

Lingkungan masyarakat yang melanggengkan sistem Patriarki juga memperkuat budaya memperkosa atau *Rape Culture* yang juga mendorong sikap menyalahkan korban. Adanya *Stereotype* (mengklisekan) dan bias gender yang memunculkan pandangan, sikap, atau perilaku yang menyalahkan dan menyudutkan korban, pandangan dan sikap tersebut memiliki pengaruh dalam proses hukum, contoh : Dalam perkara perkosaan seringkali majelis hakim menyatakan memberikan *Stereotype* kepada korban dengan mengatakan bahwa korban (Perempuan) yang salah dalam berpakaian, tingkah laku dan aspek-aspek lainnya.

Pelecehan seksual sering menimpa wanita, namun butuh tanggung jawab, kepedulian dan kewaspadaan semua orang untuk mencegahnya. Bukannya hanya membela perempuan, dan tidak ada korban laki laki dalam kasus ini. Pelecehan seksual juga terjadi pada laki laki meski tidak sebanyak pada wanita, dan oleh karena itu kewaspadaan tetap diperlukan oleh semua pihak baik laki laki maupun perempuan. Namun, kebiasaan

mewajarkan sebuah tindakan pelecehan akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Pada era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah kekerasan terhadap perempuan seharusnya tidak terjadi lagi. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar HAM. Kenyataannya globalisasi dan individualisme selalu memberi jalan terjadinya tindak kekerasan ini.²

Budaya menyalahkan korban begitu lazim ditemui sehingga banyak para korban pelecehan seksual menjadi takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Beberapa korban mungkin khawatir akan mendapat stigma buruk. Korban dianggap merusak nama baik keluarga atau lembaga. Mereka bahkan dapat dikriminalisasi karena melaporkan tindak pelecehan atau pemerkosaan tersebut.³ Perbuatan tersebut melanggar Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf a. Respon masyarakat yang tidak positif ini, membuat banyak korban dan masyarakat diam walaupun mengetahui atau mengalami sebuah kasus pelecehan seksual. Pandangan masyarakat yang cenderung “menyalahkan korban” (*Blame in the victim*) semakin membuat korban tidak dipedulikan keberadaannya.

Seperti kasus yang dialami Baiq Nuril. Kisah Baiq Nuril adalah kisah dan perjuangan rakyat kecil yang tidak mendapatkan keadilan. Baiq nuril adalah guru honorer yang menjadi korban pelecehan seksual yang

¹Rena Yulia, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 1, 2 April 2009, hlm. 1.

²Emilda Firdaus, Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Nomor 1, Vol. 21 Januari 2014, hlm.139-154.

³Aditya Aulia Wibowo, "Indonesia Punya Masalah Rape Culture" Artikel Pada *Jurnal Kebenaran*, Vol. 1 Juli 2017, hlm.3.

dilakukan oleh kepala sekolah di tempat dia mengajar. Baiq Nuril merekam percakapan antara dia dan Kepala Sekolah tersebut dan memberikan rekaman tersebut kepada rekan kerjanya Imam Mudawin sebagai bukti kelakuan tidak pantas Kepala Sekolah, namun rekaman itu malah disebar oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram. Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, kepala sekolah tersebut melaporkan Baiq ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan Kasasi dengan Nomor 574/Pid.Sus/2018 yang baru diterima 9 November 2018 menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman enam bulan penjara dan denda senilai Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh perilaku menyalahkan korban terhadap penegakan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan sehingga tidak menjadi korban di Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh perilaku menyalahkan korban terhadap penegakan hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan sehingga tidak menjadi korban di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pengaruh perilaku menyalahkan korban bagi penegakan hukum tindak pidana kesusilaan di Indonesia
- c. Penelitian ini sebagai informasi dan alat pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pengaruh perilaku menyalahkan korban bagi penegakan hukum tindak pidana kesusilaan di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Eleanor Roosevelt selaku ketua komisi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa, ketika merumuskan *Universal Declaration of Human Right*. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak kodrati atau hak suci. Hak kodrati karena melekat pada diri manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak suci karena hak tersebut berasal dari Tuhan, sehingga tidak boleh dilanggar dan harus dihormati.⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan standar umum bagi peningkatan penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia agar lebih bermartabat dan dilindungi, yang

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>

⁵Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasimi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 88.

berlandaskan kepada keadilan, kebebasan serta kedamaian.⁶

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan standar umum bagi peningkatan penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia agar lebih bermartabat dan dilindungi, yang berlandaskan kepada keadilan, kebebasan serta kedamaian.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

3. Kerangka Konseptual

Adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁹

1. Perilaku Menyalahkan korban adalah suatu tindakan atau aktifitas¹⁰ menyalahkan dari manusia itu sendiri terhadap korban dari suatu tindak pidana.

2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹

3. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.¹²

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹³ Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, yaitu *asas ex aequo et bono* (asas kelayakan dan asas kepatutan)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dan juga istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah

⁶Emilda Firdaus, 2014, "Implementasi Undang-undang Nomor 23, Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No1, VOL.21, Januari, 2014, hlm.144.

⁷Emilda Firdaus, 2014, "Implementasi Undang-undang Nomor 23, Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No1, VOL.21, Januari, 2014, hlm.144.

⁸ Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁹ Zainudin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 96.

¹⁰<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html>

¹¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13.

delik.¹⁴ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum pidana dan Perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti: Peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.¹⁵

Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Dalam hal ini perkataan perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan konkrit; Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan konkrit yaitu, hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja.¹⁶

Menurut terjemah moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title: "tentang kejahatan terhadap kesusilaan"¹⁷, sedangkan menurut Soesilo, dibawah title: "kejahatan tentang kesopanan", selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah "tindak pidana asusila".¹⁸

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996, hlm 111.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54-55.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 102

¹⁸ S.R.Sianturi, S.H, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Jakarta, Alumni AHM- PTHM, 1983, hlm 222

Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.¹⁹

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut makadapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita

¹⁹ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Alumni AHMPH, 1982, hlm. 207

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁰

- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²¹
- c. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²²

C. Tinjauan Umum Perilaku Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*)

Pendekatan *victim blaming* berasumsi bahwa seseorang menjadi korban karena sesuatu yang "salah" pada korban.²³ Istilah tersebut telah dikenal dari tahun 1971 oleh William Ryan. *Victim blaming* adalah sikap yang menyalahkan korban sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas terjadinya sebuah kejahatan. Benedict menyebutkan delapan faktor

yang *menyebabkan victim blaming* dalam berita:²⁴

1. Jika korban mengetahui pelaku'
2. Jika tidak ada senjata yang digunakan,
3. Jika korban berasal dari ras yang sama,
4. Jika korban berasal dari kelas yang sama,
5. Jika korban berasal dari kelompok etnis yang sama,
6. Jika korban masih muda,
7. Jika korban "cantik",
8. Jika korban menyimpang dari peran gender perempuan.

Selain itu, Eigenberg & Garland menyebutkan, *victim blaming* seringkali terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan perempuan karena menyimpang dari konstruksi masyarakat terhadap perempuan.²⁵ Dampak terjadinya *victim blaming* antara lain terjadinya kejahatan yang lebih lanjut, yakni korban menerima tanggapan negatif dan cenderung mengalami penderitaan yang lebih besar dan kecil kemungkinan untuk melaporkan kasusnya ke penegak hukum. Korban yang akhirnya disalahkan lebih memilih untuk menghindari viktimisasi sekunder yang dapat terjadi di kemudian hari sehingga mereka lebih memilih tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya.²⁶ Dampak lain *victim blaming* yaitu pada tingkat kepercayaan korban terhadap para saksi dan pemerintah serta lingkungan

²⁰ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

²¹ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

²² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997, hlm. 108

²³ Karmen, Andrew, *Crime Victims: An Introduction to victimology*, Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning, 2001.

²⁴ Benedict, Helen, *Virgin Or Vamp: How To The Pres Covers Sex Crimes*, Oxford University Pres, 1992, hlm. 19

²⁵ Eigenberg, H., & Garland, R.. *Victim blaming*. In L.J. Moriarty (Ed.), *Controversies in Victimology*. Newark. NJ: Elsevier Press, 2008, hlm. 21-36

²⁶ Coates, L., Richardson, C., & Wade, A. *Reshaping Responses to Victims of Violent Crime*. Presented at Cowichan Bay, B.C., Canada. http://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf

sosialnya.²⁷ Korban akan lebih sensitif dalam memilih kelompok yang akan mempercayai serta mendukungnya atau bahkan menyalahkannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem -subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system).

²⁷ George, W.H., & Martinez, L.J. . *Victim blaming in Rape: Effects of Victims and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism*. Psychology of Women Quarterly, 2002, hal.110-119

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pengaruh Perilaku Menyalahkan Korban Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power*”, PBB 1985 yang dimaksud korban atau viktin adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomi atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota.²⁸

Perempuan secara struktural diposisikan sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga membuat perempuan rentan menjadi korban kejahatan.²⁹ Namun, para perempuan korban kekerasan ini tidak ditangani dengan baik atau bahkan laporannya diabaikan pada saat sistem peradilan pidana. Ditemukan pola pengingkaran, pengabaian dan pembungkaman atas tuntutan korban, yang bermuara pada reviktimisasi dan jauhnya penyelesaian kasus dari keadilan.³⁰ Padahal negara sebagai penyelenggara peradilan pidana harus memiliki hukum yang merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan

²⁸ www.ohchr.org

²⁹ Chris Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup, *Criminology*. New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 493

³⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan: *Tak Hanya Dirumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang*. Jakarta: 2010, hal.1

perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.³¹

Kemudian bila kita melihat pengertian dari sistem peradilan pidana menurut *Larry Siegel* adalah sebuah sistem normatif yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum lembaga, mengadili kejahatan, dan mengoreksi tindakan kriminal. Sistem peradilan pidana juga merupakan kontrol sosial untuk menangani perilaku atau tindakan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat.³² Namun yang terjadi justru banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani dengan baik atau bahkan diabaikan, sehingga luput dari meja hijau.

Perempuan korban tindakan kekerasan cenderung tidak ingin berinteraksi dengan sistem peradilan pidana. Beberapa alasan mendasari keputusan tersebut, yaitu berusaha menghindari pengalaman buruk yang pernah dialami korban-korban sebelumnya.³³

Semua korban kejahatan mengharapkan sikap petugas yang membuat mereka tenang pada saat pelaporan, namun tanpa disadari banyak petugas yang membuat korban merasa semakin terpuruk. Korban yang datang dengan kondisi yang merasa depresi, takut, dan tentunya butuh perlindungan malah mendapati petugas yang tidak berperasaan dan memperpanjang kasus dengan tidak segera memprosesnya karena berbagai

alasan.³⁴ Korban hanya semakin terpuruk saat berusaha menjawab pertanyaan tersebut karena dipaksa harus mengingat peristiwa perkosaan itu. Namun, yang menyedihkannya lagi korban tidak bisa protes karena harus mengikuti prosedur yang ada.³⁵

Guncangan psikis yang dialami korban bisa makin bertambah pada saat melalui proses peradilan pidana. ditemukan pada saat pembuktian yang hampir selalu mengalami kesulitan. Hukum lebih banyak berpihak pada pelaku dari pada ke para korban. Para korban diinterogasi dengan cara menegasi apa yang korban alami. Semua ini terjadi karena budaya patriarki yang membentuk bahwa sadar orang untuk mempercayai bahwa perempuan yang diperkosa adalah perempuan yang pasti ada unsur-unsur perempuan bukan baik-baik.³⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Sehingga Tidak Menjadi Korban Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Kita mengkonstruksi kejahatan sebagai bagian dari pengalaman seseorang dan bagian dari hal-hal yang kita baca, lihat dan dengar. Dengan begitu, kita mengkhawatirkan atau lebih waspada akan suatu kondisi tertentu yang kita anggap berpotensi timbul kejahatan agar tidak menjadi korban.³⁷ Korban kejahatan tentu akan mengalami banyak kerugian, seperti kehilangan, penderitaan, ketakutan,

³¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung, 2006, hlm. 7

³² Siegel, Larry, *Criminology* (Seventh Edition). California: Wadsworth/Thomson Learning, 2000, hlm. 475

³³ Richard B. Felson and Paul Phillippe Paré, *The Reporting of Domestic Violence and Sexual Assault by Nonstrangers to the Police*, Pennsylvania: National Council on Family Relations, 2005 hlm. 62

³⁴ Karmen, Andrew, Op. Cit, hlm. 152

³⁵ Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology*, Lexington: D.C. Heath and Company, 1974, hlm. 170

³⁶ Arivia, Gadis, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 323.

³⁷ Chris Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup. 2005. *Criminology*. New York: Oxford University Press, hlm 185.

perilaku antisosial adalah masalah utama korban kejahatan.³⁸

Kerugian atau penderitaan yang berpotensi paling besar terjadi adalah penderitaan psikologis, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih khusus. Penderitaan psikologis yang paling terkait dengan perempuan korban kekerasan adalah *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan *major depression*.³⁹ Trauma dapat mengguncang keseimbangan tubuh dan jiwa, mendesakkan diri dalam ingatan, menyebabkan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sehari-hari, pengalaman-pengalaman bahagia dan menyenangkan, kejadian-kejadian biasa yang sesungguhnya mengisi kehidupan kita selama puluhan tahun, terpinggirkan dan seolah jadi tak penting. Yang menguasai ingatan dan pikiran, untuk sementara waktu, adalah peristiwa traumatis tersebut. Seseorang akan mengalami trauma dengan intensitas tertentu, tergantung dengan upaya penyembuhannya. Apakah setelah mengalami peristiwa traumatis seseorang langsung dibimbing untuk menstabilkan kondisi emosinya, atau bahkan tidak mendapat tindakan apapun dari kerabat dekat atau orang lain yang membuat ia mengalami trauma secara berkepanjangan.⁴⁰

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar HAM. Kenyataannya globalisasi dan individualisme selalu memberi jalan terjadinya tindak kekerasan ini.⁴¹

Sebenarnya dalam menanggulangi masalah viktimisasi yang dialami perempuan korban kekerasan, saat ini Indonesia sudah mengesahkan beberapa Undang-Undang. Seperti meratifikasi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, sebagai korban, perempuan korban kekerasan juga bisa terpenuhi hak-haknya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari semua kebijakan tersebut diharapkan perempuan dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan yang berbasis gender.

Suatu Perlindungan hukum bagi korban merupakan tanggung jawab perangkat penegak hukum/pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, kerana perlindungan hukum merupakan hak yang harus di peroleh semua kalangan, sehingga perlindungan hukum itu merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban.

Unsur-unsur dari sistem perlindungan korban adalah:⁴²Adanya mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan, Adanya pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan HAM, Adanya protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya

³⁸ Siegel, Larry. 2000. *Criminology* (Seventh Edition). California: Wadsworth/Thomson Learning, hlm. 85.

³⁹ Lorraine Wolhuter, Neil Olley, David Denham. 2009. *Victimology: Victimization and Victims' Rights*, New York: Routledge Cavendish, hlm. 53.

⁴⁰ www.pulih.or.id

⁴¹ Emilda Firdaus, Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Nomor 1, Vol. 21 Januari 2014, hlm.139-154.

⁴² *Ibid.*

perlindungan dan pemberdayaan, Adanya pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim dan panitera pengadilan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi korban dengan baik, Adanya kemudahan bagi korban untuk memperoleh layanan pendampingan, termasuk konseling trauma, untuk pemulihan dan pemberdayaan korban kendatipun mereka memilih untuk tidak menempuh jalur hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Perempuan korban tindakan kekerasan cenderung tidak ingin berinteraksi dengan sistem peradilan pidana. Beberapa alasan mendasari keputusan tersebut, yaitu berusaha menghindari pengalaman buruk yang pernah dialami korban-korban sebelumnya. Pengalaman buruk yang membuat korban malas berinteraksi dengan aparat hukum adalah pengabaian laporan atau polisi tidak terlalu menganggap serius kasus yang dilaporkan korban, bahkan tidak jarang polisi menyalahkan korban (*victim blaming*) dan menganggap bahwa korban yang menyebabkan kejahatan ini terjadi. Saat pendampingan terhadap korban di tingkat kepolisian, masih ditemukan Aparat Penegak Hukum yang menyudutkan korban sehingga korban merasa tidak nyaman dan masih ada Aparat Penegak Hukum yang tidak kooperatif dengan pihak pendamping dan juga keluarga korban. Tidak ditahannya pelaku, sehingga kasus akhirnya tidak berlanjut dan terpaksa pihak mitra mencabutnya karena proses hukum yang terlalu lama yang menyita waktu dan juga finansial mitra. Derita yang dialami pada

saat proses penanganan yang tidak sensitif dan kurangnya pengertian terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan korban membuat korban stres dan gelisah berkepanjangan. Prosedur pengumpulan bukti, seperti visum, membuat korban harus merelakan tubuhnya menjadi barang bukti dan menjadi konsumsi publik tanpa adanya privasi. Dengan begitu, korban secara tidak langsung mengalami viktimisasi kembali atau viktimisasi sekunder selama proses peradilan pidana. Semua korban kejahatan mengharapkan sikap petugas yang membuat mereka tenang pada saat pelaporan, namun tanpa disadari banyak petugas yang membuat korban merasa semakin terpuruk. Korban yang datang dengan kondisi yang merasa depresi, takut, dan tentunya butuh perlindungan malah mendapati petugas yang tidak berperasaan dan memperpanjang kasus dengan tidak segera memprosesnya karena berbagai alasan. Korban hanya semakin terpuruk saat berusaha menjawab pertanyaan tersebut karena dipaksa harus mengingat peristiwa perkosaan itu. Namun, yang menyedihkannya lagi korban tidak bisa protes karena harus mengikuti prosedur yang ada. Guncangan psikis yang dialami korban bisa makin bertambah pada saat melalui proses peradilan pidana. ditemukan pada saat pembuktian yang hampir selalu mengalami kesulitan. Hukum lebih banyak berpihak pada pelaku dari pada ke para korban. Para korban diinterogasi dengan cara menegasi apa yang korban alami.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum Agar lebih berfokus melakukan pemeriksaan pada perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku dan apa yang dialami oleh korban tindak kesusilaan, bukan berfokus pada

bagaimana itu terjadi, karena perbuatan asusila berada dipikiran pelaku, bukan pada apa yang dikenakan atau dilakukan korban.

2. Bagi para korban tindakan kesusilaan agar berani melakukan konsultasi atau laporan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak menunda-nunda untuk melaporkan sesuatu yg dianggap telah merugikan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazaw, 2007, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *KUHP dan KUHP: edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Yasmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arivia, Gadis, 2006, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baringbing, R.E, 2004, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Benedict, Helen, 1992, *Virgin Or Vamp: How To The Pres Covers Sex Crimes*, Oxford University Pres.
- Chris Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup, 2005, *Criminology*. New York: Oxford University Press.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Doak, Jonathan, 2008, *Victims Rights, Human Rights, and Criminal Justice: Reconceiving The Role of Third Parties*. Portland: Hart Publishing.
- Eigenberg, H., & Garland, R., 2008, *Victim blaming*. In L.J.Moriarty (Ed.), *Controversies in Victimology*, Newark. NJ: Elsevier Press.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasimi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Israel Drapkin dan Emilio Viano, 1974, *Victimology*, Lexington: D.C. Heath and Company.

- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung.
- Karmen, Andrew, 2001, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
- Laurie. A. Rudmen dan Peter Glick, 2008, *The Social Psychology of Gender: How Power and Intimacy Shape Gender Realations*, New York: The Guildford Press.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Logan, Anne, 2008, *Feminism and Criminal Justice: A Historical Perspective*. Palgrave Macmillan.
- Lorraine Wolhuter, Neil Olley, David Denham, 2009, *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, New York: Routledge Cavendish.
- Malcolm Davies, Hazel Croall, dan Jane Tyrer, 2005, *Criminal Justice: An Introduction to Criminal Justice System in England and Wales*, Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F.Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Srafika, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Setiadi, Elly M, Kama dan Ridwan, *Ilmu Sosial dan Budaya*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Siegel, Larry, 2000, *Criminology* (Seventh Edition), California: Wadsworth /Thomson Learning.
- Smart, Carol, 2003, *Feminism and The Power of Law*, London: Routledge.
- S.R.Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.
- _____, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.
- Soedarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi*

Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung.

Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Susan L. Miller. 1998. *Crime Control and Women: Feminist Implications of Criminal Justice Policy*, Thousand Oaks: SAGE Publication, Inc.

TK Logan, Robert Walker, Carol E. Jordan, dan Carl G. Leukefeld, 2006, *Women and Victimization: Contributing Factors, Interventions, and Implications*, Washington DC: American Psychological Association.

Walklate, Sandra, 2007, *Imagining The Victim of Crime*, Berkshire: Open University Press.

Waluyo, Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Weisberg, D. Kelly, 1993., *Feminist Legal Theory: Foundation*, Philadelphia: Temple University Press.

William A. Westley, 1970, *Violence and The Police: A Sociological Study of Law, Custom, and Morality*, Baskerville: The Colonial Press Inc.

B. Jurnal

Aulia Wibowo, Aditya, “Indonesia Punya Masalah Rape Culture” *Jurnal Kebenaran*, Vol. 1, 1 Juli 2017.

Fendri, Azmi, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.2, 1 Agustus 2011.

Firdaus, Emilda, “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Nomor 1, Vol. 21 Januari 2014.

George, W.H., & Martinez, L.J. *Victim blaming in Rape: Effects of Victims and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism*. *Psychology of Women Quarterly*, 2002.

Lazarus-Black, Mindie. 2008. *Vanishing Complainants: The Place of Violence in Family, Gender, Work, and Law*. Chicago: Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras Campus.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Richard B. Felson and Paul-Phillipe Paré, 2005, *The Reporting of Domestic Violence and Sexual Assault by Nonstrangers to the*

Police. Pennsylvania: National Council on Family Relations.

Shalhoub-Kevorkian, Nadera. 2002. *Femicide and the Palestinian Criminal Justice System: Seeds of Change in the Context of State Building?* Jerusalem: Blackwell Publishing.

Yulia, Rena, “*Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol.1, 2 April 2009.

C. Artikel/Makalah

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2010: Tak Hanya Dirumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang. Jakarta: 2010.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2011: Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara. Jakarta: 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan

Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

E. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Maulana, Drs. Rizky dan Dra. Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV. Cahaya Agency, Surabaya.

Sam S. Warib, 2001, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Sandro Jaya, Jakarta.

Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang.

F. Website

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>,

<https://www.voaindonesia.com/a/justicefor-audrey-bullying-remaja-belaka-atau-kekerasan-seksual-/4868859.html>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html>

<https://www.komnasperempuan.go.id>
Jimly Asshidiqie, “*Penegakan Hukum*”, Makalah dari situs resmi www.Jimly.com

Coates, L., Richardson, C., & Wade, A.
Reshaping Responses to Victims
of Violent Crime. Presented at
Cowichan Bay, B.C., Canada.
http://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf

www.ohchr.org

www.lbh-apik.or.id

www.pulih.or.id